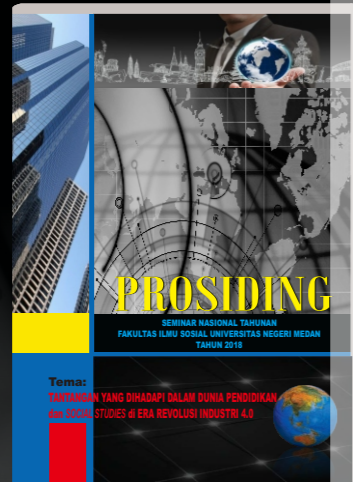


PROSIDING



<http://semnasfis.unimed.ac.id>



PROSIDING SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



9 772548 435001

DIGITAL LIBRARY
Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema: Tantangan Yang dihadapi Dalam Dunia Pendidikan
dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0

Vol. 2, Tahun 2018

p-ISSN 2549-435X



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2018

Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan *Social Studies* Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesainya prosiding ini.

Medan, Desember 2018
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd

THE
Character Building
UNIVERSITY

Pola Konflik Tanah Pantai Timur Sumatera Tappil Rambe	512 – 515
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Bakhrul Khair Amal	516 - 518
Ragam Paradigma Penelitian Sosial Hidayat	519 - 524
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nurjannah	525 - 527
Penyebab Terjadinya Kerusakan Pantai Ditinjau dari Aspek UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yusna Melianti	528 - 533
Peranan Teungku Chik di Waido Ulama Ahli Meugoe (Kajian Historis, Edukasi, Pertanian dan Kontribusinya pada Masyarakat Pidie Kekinian) Usman	534 - 540
Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara Tm. Jamil & Maimun	541 - 544
Analisis Kesiapan Guru Kelas dalam Implementasi Penilaian Autentik Berbasis Karakter di SD Negeri Kabupaten Dairi Citra Magdalena Butarbutar	545 - 550
Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berorientasi pada Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 030293 Laehole Dairi Yanti Rosdiana Berutu	551 - 555
Buruh Harian Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Bandar Perbaungan Lukitaningsih & Syarifah	556 - 558
Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis IT Irfa Aulaini Damanik	559 - 561
Pengaruh Metode Wayang terhadap Hasil dan Motivasi Siswa pada Pembelajaran PKn Indahnya Keragaman Di Negeriku Tema 7 Kelas IV SD Negeri 067243 Kec. Medan Selayang Tahun Pelajaran 2018/2019 Ifran Fredy Tarigan, Dkk	562 - 564
Blended Learning, Solusi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 Joy Prima Siahaan	565 - 567
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe <i>Snowball Throwing</i> di Kelas IV SDN Inpres No. 064022 Simalingkar B Medan Tahun Ajaran 2018/2019 Fauziah Nasution	568 - 571
Pengaruh Pendekatan Kontekstual pada Materi Pemilu Mata Pelajaran PKn Kelas VI Kec. Percut Sei Tuan Luciana Simanjuntak	572 - 573
Perbedaan Model <i>Contextual Teaching And Learning</i> Dengan Model Pembelajaran Konvensional terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 102083 Pabatu Maria Melfa Simanjuntak	574 - 577
Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya terhadap Peran Pendidik di Abad 21 dalam Dunia Pendidikan Masleni Harahap	578 - 580

POLA KONFLIK TANAH PANTAI TIMUR SUMATERA

Dr. Tappil Rambe, M.Si

Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Corresponding author :

Abstrak

Sebelum kolonial berkuasa, wilayah Sumatera Utara yang dahulu dikenal sebagai Sumatera Timur dalam sistem penguasaan tanah masih dilakukan secara adat. Mengikuti sistem pertanian masyarakat pribumi berladang reba (ladang berpindah), maka pola kekuasaan didasarkan atas kepentingan bersama yang memang penggunaan tanah sekadar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ketika kolonial masuk sejak pertengahan abad ke-19, pola penguasaan tanah berganti ke dalam sistem industrialis atau lebih dikenal sebagai sistem kapitalis. Maka sejak saat itu tanah di wilayah Sumatera Timur, khususnya bagian pesisir Deli memiliki konflik tanah secara luas.

Konflik tanah yang banyak terjadi di Sumatera Timur tidak terlepas dari pola-pola kekuasaan tanah sejak kolonial berkuasa. Penguasa adat dijanjikan keuntungan dan kemewahan, baik secara moril maupun materil. Dalam bentuk moril penguasa adat yang pada dasarnya berkuasa setaraf kepala suku atau chipdom diangkat seolah-olah sebagai kepala negara dalam bentuk sultan di ruang lingkup wilayah kesultanan. Ini terjadi pada kesultanan-kesultanan yang dikenal seperti Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat, Kesultanan Kota Pinang, dan sebagainya. Dengan perubahan seperti itu maka tanah yang pada awalnya dikuasai secara adat berganti menjadi tanah yang dikuasai ke dalam kesultanan. Dengan begitu konsesi tanah mampu dilakukan secara meluas oleh pihak kolonial dengan kesultanan tanpa memperhatikan hak-hak rakyat ke dalam sistem adat. Keuntungan materi pun didapat secara luas dalam bentuk ekonomi, baik dari kolonial maupun pihak kesultanan.

Ketika Jepang berkuasa di tahun 1942, sistem penguasaan berganti arah. Penguasaan tanah dilakukan dengan bentuk yang berbeda. Kekuasaan tanah dikembalikan kepada rakyat dengan catatan produk tanahnya untuk kepentingan Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Kekuasaan sultan dikebiri, dan rakyat yang menduduki tanah bukan kembali sutuhnya kepada masyarakat adat, sebab pribumi yang menggarap adalah orang-orang yang datang ketika industri perkebunan meluas di masa kolonial Belanda.

Kata Kunci : Konflik Tanah, Kekuasaan, Kaum Petani

PENDAHULUAN

Pendudukan rakyat atas tanah di masa Jepang sangat mempengaruhi di awal kemerdekaan. Rakyat yang menduduki tanah tidak menginginkan sistem feodal kembali berkuasa. Oleh sebab itu timbul peristiwa seperti Revolusi Sosial yang cukup berdarah-darah (Peristiwa Tanjoeng Morawa, Peristiwa Sunggal, Peristiwa Bandar Betsy). Hal ini juga dimanfaatkan oleh segelintir elit politik di pusat untuk mendukung kekuatannya. Partai politik, terutama PKI mendukung perebutan-perebutan tanah oleh rakyat. Partai ini seperti bandit sosial yang membela kepentingan rakyat. Tanah yang dikuasai secara luas oleh seseorang ataupun beberapa orang dianggap sebagai tuan tanah yang jahat. Bagi PKI tanah tersebut harus direbut dan wajib dikembalikan kepada rakyat untuk digarap. Sejatinnya tindakan-tindakan tersebut sebagai modus penanggulangan suara dalam pemilu 1955 dan terutama di masa era demokrasi liberal, ketika suara rakyat menjadi penentu kekuasaan di negeri ini.

Strategi PKI dalam mengangkat isu tanah cukup berhasil. Peristiwa-peristiwa perebutan tanah oleh masyarakat mewarnai hari-hari kampanye dalam pemilu 1954. Pada puncaknya PKI mampu mendulang suara cukup signifikan, menjadi yang terbesar kedua setelah PNI dan Masyumi. Itu adalah periode saat PKI mulai duduk di pemerintahan hingga tahun 1965. Selama itu isu tanah menjadi isu yang utama dalam propaganda politik mereka. Ketika Orde Baru berkuasa, penguasaan tanah tidak kembali kepada rakyat, melainkan dimainkan oleh para penguasa dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha memainkan peran penting dalam kekuasaan tanah sekaligus mempertajam konflik tanah yang semakin tidak jelas dalam hal kepemilikannya.

PEMBAHASAN

Paige dalam Pemetaan Konflik

Persoalan pelik pertanahan di Indonesia antara lain disebabkan tumpang tindihnya UU yang berkaitan dengan Agraria (pertanahan, hutan, tambang, perkebunan, mineral batu bara dan migas) yang tidak mengacu kepada konstitusi UUD 1945 dan UUPA 1960. Hal ini mengakibatkan tanah-tanah yang ditempati masyarakat, khususnya masyarakat rakyat kecil di pedesaan dan pedalaman, menjadi tidak terlindungi, rentan terhadap aksi-aksi perampasan tanah yang dilegalkan atas nama pembangunan dan investasi.

Negara atau elit kuasa beserta pengusaha muncul sebagai bandit tanah yang memberi peluang kepada elit untuk melakukan praktik-praktik perbanditan. Sehingga bentuk-bentuk ini malah membuka ruang konflik yang seharusnya tidak terjadi.

Paige (1975) mengajukan tesis bahwa konflik pertanahan bisa muncul dalam syarat antara bukan penggarap tanah dan penggarap tanah, karena kedua kelompok bersangkutan mempunyai kecenderungan perilaku ekonomi dan politik yang berbeda. Perilaku ekonomi-politik itu sendiri dipengaruhi oleh sumber penghasilan mereka. Sumber penghasilan kelompok pertama berasal dari tanah (land) atau modal komersial (capital). Sedangkan kelompok kedua sumber penghasilannya berasal dari tanah dan upah (wage). Kalau perilaku antara kelompok bukan penggarap dan kelompok penggarap itu berlawanan dan konflik makin meruncing maka percikan gerakan perlawanan oleh petani kelas bawah akan berkobar.

Kaum petani bukan penggarap (noncultivators) yang sumber penghasilannya dari tanah secara ekonomis biasanya lemah dan karenanya mereka harus menyandarkan diri pada restriksi kepemilikan tanah oleh petani penggarap. Akibatnya, konflik antara kaum petani bukan penggarap dan petani penggarap terfokus pada masalah pengendalian kepemilikan dan distribusi tanah. Sementara itu, kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal komersial atau industrial secara ekonomis biasanya kuat dan karena itu mereka menghendaki restriksi kepemilikan tanah diminimalkan. Konflik yang mungkin timbul antara kaum petani bukan penggarap dan kelompok petani penggarap terfokus pada distribusi pendapatan atas tanah atau modal, bukan pada kepemilikan tanah atau modal itu sendiri.

Kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah biasanya tergantung pada buruh rendahan atau semi rendahan dan karena itu mereka tidak mengijinkan adanya perluasan hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani penggarap. Konsekuensinya, konflik-konflik yang terjadi cenderung berdimensi ekonomi dan politik. Sebaliknya kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal komersial atau industrial biasanya tergantung pada buruh lepas dan karena itu mereka dapat mentolerir adanya hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani penggarap. Akibatnya, konflik-konflik yang muncul cenderung berdimensi ekonomi dari pada politik.

Kaum petani bukan penggarap yang mengandalkan sumber penghasilannya dari tanah dan ini berkaitan erat dengan produk pertanian yang statis, biasanya menciptakan konflik yang bersifat zero-sum antara kelompok petani penggarap. Karena itu kompromi dalam konflik-konflik ekonomi yang terjadi akan sulit terdamaikan. Sebaliknya petani bukan penggarap yang mengandalkan penghasilannya dari modal komersial atau industrial dapat meningkatkan pendapatannya melalui investasi modal guna meningkatkan hasil pertanian untuk dibagi dengan kelompok petani penggarap. Itulah sebabnya, konflik-konflik yang terjadi bersifat non zero-sum dan karena itu kompromi-kompromi dalam konflik ekonomi antara petani bukan penggarap dengan kelompok petani penggarap bisa dilakukan.

Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap semakin besar penolakan mereka terhadap resiko dan ide-ide revolusioner. Semakin besar arti penting upah dalam bentuk uang atau barang sebagai sumber penghasilan kelompok petani penggarap semakin besar penerimaan mereka pada resiko dan tawaran-tawaran revolusioner.

Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap. Kuat dorongan ke arah kompetisi ekonomi dan lemah dorongan ke arah pengorganisasian politik. Semakin besar arti penting upah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, semakin lemah kompetisi ekonomi mereka dan semakin besar dorongan ke arah pengorganisasian politik.

Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, semakin besar isolasi struktural yang membuat mereka tergantung pada kelompok petani bukan penggarap dan semakin lemah dorongan-dorongan ke arah solidaritas politik. Semakin besar saling ketergantungan mereka dengan kelompok petani bukan penggarap dan semakin kuat dorongan ke arah terciptanya solidaritas politik.

1. Konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (agrarian revolt).
2. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah melahirkan gerakan komoditas (reform commodity movement).
3. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan penggarap yang sumber penghasilannya dari upah melahirkan revolusi agraria (agrarian revolution).
4. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal dengan kelompok petani kelas bawah yang sumber penghasilannya dari upah melahirkan gerakan reformasi buruh (reform labor movement).

Dari informasi Paige (1975) mengatakan, bahwa di antara tipe-tipe organisasi agraris, sistem penggarapan cenderung ke arah agrarian revolt jika dilihat pada kuadran pertama. Penyesuaian kedua kepentingan antar penggarap dan bukan penggarap tidak mudah dicapai karena keduanya tergantung atas tanah. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi tidak bisa diselesaikan begitu saja, atau memang tidak bisa diselesaikan sama sekali.

Berdasarkan uraian Paige di atas pada dasarnya ada pihak lain yang sebenarnya bermain di arena konflik pertanahan. Bukan sekadar antara penggarap dengan bukan penggarap, melainkan pihak yang ada di tengah-tengah perseteruan. Bukan sebagai penengah yang diharapkan, melainkan peneruh suasana, namun juga bukan provokator, melainkan pihak yang memang sedang meraih keuntungan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berhipotesis bahwa ada sumber konflik lain, selain struktur sosial dan infrastruktur material, yaitu aspek perbanditan.

Ketiga sumber konflik ini, bekerja secara sistematis dan memiliki hubungan yang bersifat dialektika, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Karena itu, sumber timbulnya konflik dalam masyarakat di Desa Perkebunan Ramunia dalam melakukan perjuangan, tidak selamanya hanya bisa dilihat dari komponen struktur sosial maupun infrastruktur material, melainkan bisa pula dari aspek perbanditan yang mempengaruhi mereka.

Tanah dan Manusia: Siapa Penggarap, Siapa Bukan Penggarap?

Konsep Paige yang memisahkan petani penggarap dan petani bukan penggarap menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan dalam melihat konflik tanah di Sumatera Timur. Paige mengajukan tesis bahwa konflik pertanahan bisa muncul dalam syarat antara bukan penggarap tanah dan penggarap tanah, karena kedua kelompok bersangkutan mempunyai kecenderungan perilaku ekonomi dan politik yang berbeda. Perilaku ekonomi-politik itu sendiri dipengaruhi oleh sumber penghasilan mereka. Sumber penghasilan kelompok pertama berasal dari tanah (land) atau modal komersial (capital). Sedangkan kelompok kedua sumber penghasilannya berasal dari tanah dan upah (wage). Kalau perilaku antara kelompok bukan penggarap dan kelompok penggarap itu berlawanan dan konflik makin meruncing maka percikan gerakan perlawanan oleh petani kelas bawah akan berkobar.

Konflik tanah di Sumatera Timur adalah bentuk konflik yang vertikal, sebab pemeran konflik adalah rakyat dan negara. Konsepnya yang memisahkan antara petani penggarap dengan petani bukan penggarap sebagai konflik horizontal telah menunjukkan juga realitas praktik perbanditan di tengah unsur konflik. Harus diakui bahwa analisis tersebut tidak sesuai dengan konflik di Perkebunan Ramunia. Hanya saja, bentuk konflik vertikal di Perkebunan Ramunia menunjukkan aktor yang berkepentingan di kalangan petani sehingga memberikan bentuk konflik secara nyata. Kepentingan petani bukan penggarap lebih dari sekadar persoalan hidup, sebab kepentingan ekonomi secara kapital juga menjadi hasrat penting dalam memperjuangkan tanah. Gerakan yang seandainya berhasil menguntungkan akan menguntungkan secara ekonomi, namun jika tidak berhasil petani bukan penggarap juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang juga tinggi karena memiliki tanah yang lebih luas daripada petani penggarap. Persoalan seperti itu yang umumnya secara ideologis tidak dimiliki petani penggarap.

Format konflik dalam analisis Paige akan kepentingan petani penggarap dengan bukan petani penggarap ada 6 (enam) dasar pokok yang bisa menunjukkan praktik perbanditan dalam konflik di Perkebunan Ramunia. Pertama, Kaum petani bukan penggarap (noncultivators) yang sumber penghasilannya dari tanah secara ekonomis biasanya lemah dan karenanya mereka harus menyandarkan diri pada restriksi kepemilikan tanah oleh petani penggarap. Akibatnya, konflik antara kaum petani bukan penggarap dan petani penggarap terfokus pada masalah pengendalian kepemilikan dan distribusi tanah. Sementara itu, kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal komersial atau industrial secara ekonomis biasanya kuat dan karena itu mereka menghendaki restriksi kepemilikan tanah diminimalkan. Dalam konflik tanah yang ada di Sumatera Timur, restriksi kepemilikan tanah petani penggarap diperkuat melalui gerakan-gerakan perjuangan, sebab musuh yang nyata adalah negara. Petani bukan penggarap menghindari konflik yang mungkin timbul antara kaum petani bukan penggarap dan kelompok petani penggarap yang terfokus pada distribusi pendapatan atas tanah atau modal. Hal ini untuk melindungi tanah petani bukan penggarap dari kemungkinan besar akan diambil alih oleh negara. Maka petani bukan penggarap memiliki sikap perbanditan demi kepentingan sendiri, tapi mengorbankan petani penggarap yang kurang mengetahui nilai ekonomis tanah.

Sementara itu, kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah tergantung pada buruh rendahan atau semi rendahan dan karena itu mereka tidak mengijinkan adanya perluasan hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani penggarap. Di bekas-bekas perkebunan kolonial di Sumatera Timur perluasan hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani diolah menjadi kepentingan dasar ideologi perjuangan sebab petani bukan penggarap memandang ideologi seperti itu diperlukan untuk mempertahankan tanah. Tujuannya agar petani penggarap memiliki dasar kuat untuk memperjuangkan lahan, sebab petani penggarap adalah representasi langsung dari rakyat dan negara. Petani bukan penggarap di bekas kantong perkebunan kolonial berharap simbolisasi rakyat tercipta demi kepentingan melindungi lahan mereka sendiri. Di sinilah muncul dimensi ekonomi dan politik yang menjadi dasar membentuk konflik yang akan berlarut-larut.

Kaum petani bukan penggarap juga mengandalkan sumber penghasilannya dari tanah dan ini berkaitan erat dengan produk pertanian yang statis, biasanya menciptakan konflik yang bersifat zero-sum antara kelompok petani penggarap. Sebaliknya petani bukan penggarap yang mengandalkan penghasilannya dari modal komersial atau industrial dapat meningkatkan pendapatannya melalui investasi modal guna meningkatkan hasil pertanian untuk dibagi dengan kelompok petani penggarap. Perbedaan tersebut diolah menjadi konflik zero-sum yang bergerak secara vertikal. Baik petani penggarap dengan petani bukan penggarap memperkuat visi dalam produk pertanian yang statis. Di saat yang sama, petani bukan penggarap menyimpan rencana jangka panjang sebagai tujuan komersial.

SIMPULAN

Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap semakin besar penolakan mereka terhadap resiko dan ide-ide revolusioner. Hal ini terjadi ketika para pemukim di tanah konflik menganggap bahwa wilayah tanah adalah sumber resapan air dan bagian dari program swasembada pangan. Akan tetapi di saat yang sama lahan-lahan tersebut telah disebarluaskan sebagai bagian dari rancangan kawasan ekonomi yang tinggi. Tentunya hal tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi. Hal ini tidak saja berlaku pada petani bukan penggarap, melainkan pihak-pihak elit negara. Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, maka akan semakin besar dan kuat kepentingan ekonomi sehingga mereka melakukan dorongan yang semakin besar dalam pengorganisasian politik.

Ketergantungan petani bukan penggarap kepada petani penggarap tidak lagi ditunjukkan pada alam produksi, melainkan gerakan-gerakan rakyat yang dapat melindungi kepentingan petani bukan penggarap. Di sinilah terciptanya solidaritas politik tanpa isolasi struktural dalam ketergantungan produksi dari petani penggarap. Maka kecenderungan

pemberontakan dan menciptakan konflik dari penghasilan atas tanah. Konflik tersebut dikonstruksi sebagai kepentingan petani yang pada akhirnya menciptakan sistem perbanditan sosial. Oleh sebab itu Paige menyatakan bahwa tipe organisasi agraris cenderung ke arah agrarian revolt. Hasil-hasil revolusioner dan tak-revolusioner adalah produk hubungan kelas-kelas agraria yang berbeda.

REFERENSI

- Lihat Thee Kian Wie. (1979). *The Plantation and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. University Microfilms.
- Jan Breman (1997). *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Jeffery M. Paige (1975). *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York: Macmillan, 1975.
- Samudji. (2005). "Perebutan Hak Atas Tanah: Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani Atas Tanah Mbaon di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang", Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga Program Pascasarjana.
- Tappil Rambe. (2018). *Dinamika Perbanditan Pertanahan Dari Era Kolonial Sampai Reformasi: Studi Tentang Metamorfosis Sosial Politik Bandit Pertanahan di Sumatera Utara*, Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga Program Pascasarjana.

